

KEGAGALAN TRANSISI DEMOKRATIS DAN MASA DEPAN MESIR

Poltak Partogi Nainggolan^{*)}



Abstrak

Masa depan politik Mesir menjadi pertanyaan, setelah rezim sipil Morsi dijatuhkan oleh militer melalui kudeta. Bangkitnya penolakan Ikhwanul Muslimin (IM), pendukung Morsi, atas kehadiran rezim transisi dan aksi kekerasan militer dalam menekan oposisi damai, membawa Mesir ke arah perpecahan. Sikap Barat yang tidak konsisten mendukung aksi politik damai yang dilakukan IM menambah ketidakpastian situasi politik Mesir dan membawa negeri itu ke arah kegagalan transisi demokratis. Bersama dengan transisi suram di negara Arab lainnya, situasi Mesir kian menyumbang instabilitas keamanan kawasan yang meluas dan berkepanjangan.

A. Pendahuluan

Stabilitas politik dan keamanan Mesir dipertanyakan sejak dijatuhkannya Presiden Mohammad Morsi oleh militer dan kekuatan-kekuatan pembangkang. Dunia tercengang melihat kejatuhan setelah diultimatum mundur oleh petinggi militer beberapa hari sebelumnya. Bergeraknya kembali angkatan bersenjata untuk intervensi dan mendikte masa depan politik Mesir telah meruntuhkan penilaian tentang telah berakhirnya era otoriterianisme dan munculnya demokrasi sebagai pemenang pertarungan politik dan ideologi abad 20 (Fukuyama, 1992).

Situasi politik Mesir terus menimbulkan korban tewas. Demonstrasi damai dan penguasaan kantung-kantung ruang publik

sebagai panggung demokrasi dan aksi protes atas kudeta dan kebijakan anti-demokrasi dan inkonstitusional militer dilakukan IM. Thahir Suare, universitas (Kairo) dan masjid-masjid menjadi simbol dan sekaligus benteng, pusat-pusat, dan arena perlawanan kelompok konservatif pendukung Morsi dalam menghadapi aparat keamanan yang bersenjata berat.

IM terus melakukan aksi unjuk rasa damai sebagai sikap konsisten yang menjunjung tinggi demokrasi. Diragukan jika mereka terus konsisten dan tidak akan terprovokasi masuk dalam gelombang aksi kekerasan saling balas, untuk membela diri, yang harus dibenarkan dan didukung. Dikhawatirkan situasi ini akan menuju aksi mata balas mata, dalam lingkaran

^{*)} Peneliti Masalah-masalah Hubungan Internasional pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: pptogin@yahoo.com



kekerasan yang tidak berujung. Masuknya aliran senjata (ringan) gelap dan para aktor non-negara, kelompok simpatisan Jihadis dari negara tetangga di kawasan sekitar, akan memperburuk keadaan menjadi seperti di Irak, Afghanistan, dan Suriah, yang terakhir.

Bagaimana masa depan politik dan keamanan Mesir serta dampaknya bagi kawasan? Apakah penyakit transisi demokratis yang berkepanjangan dan tidak jelas arahnya akan selalu berakhir serupa, dengan dijatuhkannya rejim sipil, dan eksisnya kembali pengaruh militer di balik kemunculan rejim sipil baru sebagai penggantinya?

B. Mengapa Morsi (Harus) Dijatuhkan?

Kekuatan politik di Mesir cukup terpolarisasi dalam beberapa kelompok besar dan kecil. Paling sedikit terdapat 4 kekuatan politik.

Pertama, kelompok militer yang berkuasa dan berperan dominan dalam politik domestik negeri piramid tersebut pasca-Gamal Abdul Nasser, yang naik ke tampuk kekuasaan melalui kudeta atas pemimpin sipil sebelumnya. Berakhirnya era Nasser tidak berarti tamatnya peran militer, kelompok ini berkuasa kembali dengan mengabaikan konstitusi, dengan naiknya Hosni Mubarak, setelah terbunuhnya Anwar Saddat dalam sebuah acara kenegaraan parade militer.

Kedua, kelompok pesaing militer sejak lama, yaitu kelompok Islam garis keras (konservatif) *Al-Ikhwaniyyah al-Muslimin* atau *Ikhwaniyyah Muslimin*, atau *Moslem Brotherhood*, yang dari dulu merupakan pengusung Sharia dan gagasan pan-Islamisme di kawasan. Dengan pemahaman yang diyakini para pengikut Salafi dan Wahab(isme), kelompok yang konservatif ini –Barat mengidentifikasinya sebagai Kelompok Islamis, yang berkonotasi negatif sebagai garis keras atau radikal, walau tidak selalu sama dengan Jihadis, yang pro-penggunaan kekerasan– semula menafikan demokrasi sebagai cara yang sah dan terhormat untuk meraih kekuasaan dan memimpin Mesir, untuk kemudian merubahnya menuju masa depan yang diimpikan. Perubahan strategi menuju kekuasaan secara damai yang menghalalkan pemilu dalam perkembangannya

berhasil meraih dukungan mayoritas rakyat Mesir yang memenangkan Morsi sebagai presiden.

Ketiga, Kelompok Islam moderat (modernis), Kelompok Minoritas Kristen Koptik dan Katholik, serta gabungan kalangan sekuler dari kelompok-kelompok agama tersebut. Jika digabung, jumlah mereka menjadi lebih banyak daripada kelompok IM. Mereka menentang pemerintahan sepihak (otokrasi) yang mengadopsi dan memberlakukan Sharia sebagai hukum nasional. Mereka percaya pada penerapan hukum positif dalam negara, dan penerapan demokrasi modern yang cocok dengan sistem pasar dan politik yang sekuler, serta *democratic governance* yang menjamin transparansi dan akuntabilitas. Aliansi kelompok modernis agama dan sekuler ini menghitung kesalahan Morsi yang hanya berpihak pada kepentingan Kelompok IM dan Kaum Salafi. Memburuknya ekonomi Mesir dan meningkatnya drastis angka pengangguran menjadi bumerang bagi Presiden Morsi.

Keempat, kelompok lain, yang walaupun jumlahnya jauh lebih minoritas, namun karena kewenangan monopoli penggunaan kekerasan secara sah yang diberikan negara kepadanya, ia mempunyai kepentingan laten (*vested-interest*) memulihkan kembali pengaruh dan kekuasaannya dalam politik nasional.

C. Dampak atas Kawasan

Pemerintahan sipil transisional Mesir yang terbentuk tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengoreksi keadaan, untuk menyiapkan transisi demokratis baru, dengan menghimbau kelompok IM agar bergabung dalam pemerintahan bersama. IM bertahan dengan pemerintahan konservatifnya yang tunggal, tanpa perlu bekerja sama dengan kelompok-kelompok lain yang berbeda pandangan dan kepentingan dalam membangun Mesir. Bagaimana dengan sikap militer? Apakah militer Mesir menghormati seruan dan harapan masyarakat internasional?

Tekanan barat harus diperlihatkan, jika tidak, ini akan membenarkan tesis Huntington (1997) tentang adanya konflik peradaban (*the clash of civilizations*) pasca-runtuhnya Blok Timur dengan ideologi komunisme, yang diikuti dengan berakhirnya Perang Dingin.

Barat akan dinilai rela mendukung militer karena sikap anti-Islamnya yang tetap eksis.

Kenyataan memperlihatkan gagalnya tekanan AS, yang selama ini bersifat ringan, yakni hanya berupaya menghentikan sementara latihan militer dengan dan rencana penjualan senjata baru ke Mesir. Mesir dikenal sebagai sahabat tradisional AS di Timur-Tengah, yang bersama-sama dengan Israel, berkat penjualan senjata AS, telah berhasil dibentuk sebagai negara kuat yang sekuler, penjaga stabilitas keamanan, di kawasan. Tetapi, ancaman penghentian latihan bersama dan pemberian bantuan militer AS untuk Mesir sepertinya tidak akan dihentikan.

Di luar AS, Uni Eropa telah meningkatkan tekanan atas Mesir. Jerman, sebagai negara penopang utama Uni Eropa, bersikap lebih keras, dengan berupaya menilai kembali hubungan dengan Mesir, sebab, pemerintah sipil transisional tampak tidak berdaya. Ini diperlihatkan dengan mundurnya Wakil Presiden El-Baradei, yang pro- atau dekat dengan Barat pasca-(operasi) kekerasan berdarah yang dilancarkan militer dan kepolisian untuk mengakhiri demonstrasi damai kelompok IM. Belakangan sikap AS dan UE melunak, dengan mendukung apa yang telah dilakukan militer untuk menumpas Kelompok IM.

Dampak *spill-over* krisis Mesir diperkirakan akan memperburuk situasi dan instabilitas politik dan keamanan di kawasan, hingga ke negara-negara Teluk. Sementara Turki menghadapi kondisi serupa, dan negara-negara otoriter dukungan Barat lainnya, seperti Saudi, Oman, Qatar dan Kuwait menghadapi ancaman yang sama. Kesultanan di Timur Tengah memang belum berakhir, dan belum menjadi korban 'garapan' demokratisasi Gelombang Keempat, selama Barat tetap mendukung rejim mereka, dan tidak menggugat praktek otokrasi dan otoriterianisme mereka. Kehadiran Al-Qaeda, kegagalan dalam kampanye menghancurkan Taliban, dan antisipasi atas kian meningkatnya pengaruh dan peran Kelompok Jihadis di Timur Tengah membuat petinggi AS berpikir ulang dan memperlihatkan sikap sangat hati-hati untuk mendorong demokratisasi atau membantu berlangsungnya Musim Semi Politik di negara-negara Arab.

D. Sikap Indonesia

Sikap Pemerintah Indonesia hingga kini masih sebatas menyampaikan seruan, supaya kekerasan jangan diteruskan. Himbauan Presiden SBY kepada PBB agar segera bertindak mengatasi keadaan di Mesir, tidak ada gaungnya, sebab PBB tengah disibukkan dengan laporan penggunaan senjata kimia di Suriah dan langkah pengiriman misi pencari fakta. Kebanyakan negara Barat seperti memaklumi keadaan Mesir tanpa Morsi, karena ia dinilai tidak mau bekerja sama dengan berbagai kelompok untuk bersama pro-demokrasi, dan membiarkan kesempatan emas yang dimilikinya melalui kemenangan dalam pemilu. Sikap pemerintah RI yang tidak melancarkan tekanan kepada militer Mesir dinilai tak lepas dari latar belakang presiden yang memiliki karir militer di masa lalu, sehingga sikap tegas RI seperti di masa lalu sebagai pendiri Non-BLok bersama Mesir tidak muncul. Kebijakan luar negeri RI pun tampak lebih sibuk dengan upaya menjaga keselamatan warga sendiri, yang tampak kontroversial. Di satu sisi RI menyatakan akan melakukan evakuasi WNI, namun di lain sisi mendukung para sukarelawan medis, seperti dari ATC, yang belum tentu independen dalam pandangan politiknya atas kelompok-kelompok yang bertikai.

DPR hingga sekarang belum menyatakan sikapnya, yang muncul baru pandangan-pandangan individual anggotanya. Diperlukan sikap yang tegas, dengan menilai secara kritis dan tepat situasi Mesir. DPR harus terbebas dari polarisasi pandangan antara yang pro-dan kontra- dengan ideologi dan kepentingan kelompok-kelompok yang bertikai. Mendorong solusi melalui peran aktif organisasi perhimpunan parlemen regional seperti PUIC (Asosiasi Parlemen Anggota OKI) untuk dapat menengahi keadaan adalah alternatif terbaik, karena mengharapkan peran negara besar akan sulit akibat bias kepentingan dan posisi mereka yang memihak atau resisten atas militer dan IM. Melalui PUIC, DPR dapat menyarankan agar semua pihak yang bertikai menghentikan aksi kekerasan dan juga setiap aksi atau respons yang dapat memancing munculnya kekerasan baru, sambil terus mendorong dilakukannya rekonsiliasi damai. Jika situasi baru yang

kondusif sudah tercipta, upaya ke arah pemilu baru yang bebas dan *fair*, termasuk bebas dari intervensi militer dan asing, akan dapat dilakukan.

E. Penutup

Mesir pantang dilupakan sebagai negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Sebaliknya, Indonesia sebagai salah satu pendukung Mesir yang konsisten dalam konfliknya, *vis a vis* Israel, di Timur Tengah, sejak negara Israel dideklarasikan dengan bantuan Barat tahun 1948. Tragedi politik Mesir menimbulkan pertanyaan, mungkinkah berulang kasus serupa di Indonesia? Karena, secara realistis terdapat beberapa kesamaan latar belakang. *Pertama*, keberadaan mayoritas Muslim. *Kedua*, dominan peran dan kuatnya posisi militer dalam politik nasional sejak lama. *Ketiga*, pernah hadirnya orang kuat atau pemimpin yang otoriter dan korup. *Keempat*, berkembang suburnya kelompok-kelompok garis keras dengan ideologi agama transnasional yang konservatif.

Masa depan musim semi demokratisasi di dunia Arab dan fenomena Gelombang Keempat demokratisasi di berbagai belahan dunia diragukan kelanjutannya. Yang lebih buruk lagi, masa depan stabilitas politik dan keamanan di Timur-Tengah semakin suram. Setelah Irak, Afghanistan, Libya, Tunisia, dan sekarang Suriah, transisi demokratis memasuki wilayah abu-abu yang dapat membawa semua negara itu kepada status negara gagal di kawasan. Kasus kudeta Morsi di Mesir dan kegagalan transisi demokratisnya hanya akan menambah daftar baru negara gagal tanpa masa depan sama sekali di luar negara-negara Maghribi dan Afrika Utara.

Indonesia harus hati-hati menyikapi perkembangan politik Mesir dan harus dapat dengan bijak melakukan otokritik dan evaluasi atas jalan demokrasi yang telah dan akan dilalui, jika tidak ingin terperosok dalam lubang yang sama. Hanya dengan langkah-langkah memberantas tuntas korupsi, menegakkan hukum secara sungguh-sungguh, melanjutkan reformasi sektor keamanan, melarang kelompok-kelompok radikal serta mengimplementasikan ideologi nasional, sebagai alternatifnya, serta memperhatikan

keadilan sosial dan membangun kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka Indonesia akan luput dari perangkap negara gagal.

Rujukan:

1. Fukuyama, Francis (1992). *The End of Ideology and the Last Man*. London: Penguin Books.
2. Hamza, Hendawi. "Mubarak may be released; 25 police killed," *The Jakarta Post*, 20 Agustus 2013.
3. Herlinda, Wike D. "UE Ancam Tarik Bantuan Ekonomi," *Bisnis Indonesia*, 20 Agustus 2013.
4. Hendram, Andika. "Hosni Mubarak Bebas," *Koran Sindo*, 20 Agustus 2013.
5. Huntington, Samuel P. (1997). *The Clash of Civilizations: And the Remaking of World Order*. London: Simon & Schusters Inc.
6. Kuncayono, Trias. "Krisis Mesir: Antara Kairo dan Riyadh," *Kompas*, 20 Agustus 2013.
7. "Mempertanyakan Bantuan Militer Mesir," *Koran Tempo*, 20 Agustus 2013.
8. "Mubarak Dibebaskan dari Tuduhan Korupsi," *Media Indonesia*, 20 Agustus 2013.
9. "25 Polisi Tewas di Sinai Utara," *Kompas*, 20 Agustus 2013.
10. Noroyono, Bambang. "Aliansi Ingin Investigasi," *Republika*, 20 Agustus 2013.
11. _____. "Diplomasi AS di Mesir Gagal," *Republika*, 20 Agustus 2013.
12. _____. "Husni Mubarak Segera Dibebaskan," *Republika*, 20 Agustus 2013.
13. _____. "Sinai Kembali Memanas," *Republika*, 20 Agustus 2013.
14. Nursyadiah, Halimah. "Hentikan Konflik Berdarah di Mesir," *Koran Tempo*, 20 Agustus 2013.
15. Oktaviani, Oki. "Serangan Militan Perparah Krisis Mesir," *Investor Daily*, 20 Agustus 2013.
16. Sucipto, Hery. "Mesir dan Terorisme Negara," *Republika*, 20 Agustus 2013.
17. "Tiga Mahasiswi RI di Mesir Dievakuasi," *Indopos*, 20 Agustus 2013.
18. "Turki Tuding OKI Lamban Tanggapi Krisis Mesir," *Investor Daily*, 20 Agustus 2013.